

## BAB II

### SEJARAH MYANMAR HINGGA DI BAWAH KEKUASAAN MILITER

Pada awal 1940-an, Burma yang sekarang menjadi Myanmar terletak di bawah kendali Kerajaan Inggris pada 1886. Namun, dinamika politik di negeri ini berubah drastis selama Perang Dunia II, ketika Jepang memasuki Burma pada bulan Januari 1942 dan mengusir administrasi kolonial Inggris. Berawal saat Jepang berhasil menguasai dua wilayah di Myanmar, berlanjut dengan Jepang memberikan pelatihan militer kepada masyarakat pada masa kekuasaannya, sehingga pihak Jepang diterima oleh para pimpinan etnis dan masyarakat Myanmar.

Akan tetapi, hal tersebut memberi konsekuensi pro dan kontra: dalam sisi kontra, penggunaan kekuasaan secara represif militer Jepang dan adanya kerja paksa pada masyarakat mengakibatkan timbulnya penderitaan yang luas, pada sisi pro, pihak Jepang memberi kelonggaran pada masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok nasionalis Burma, salah satunya yakni Burma Independence Army pimpinan Aung San, merupakan kelompok revolusioner yang pro Jepang sehingga dalam naungan angkatan darat Kekaisaran Jepang yang dibentuk oleh Kolonel Keiji Suzuki, kelompok paramiliter revolusi ini dibentuk pada 1941 di Bangkok. Setelahnya BIA dipergunakan oleh Jepang sebagai alat propaganda melawan Inggris selama masa perang dunia kedua berlangsung selama periode Jepang berkuasa (1942–1945).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Robert H. Taylor. (2009). *The State in Myanmar*. NUS Press. Hal. 224

## 2.1 Sejarah Kudeta Militer Myanmar

Sejak rezim kolonial Inggris melemah pasca Perang Dunia II, pemimpin nasionalis di Myanmar yakni Aung Sang saat itu menyatukan sejumlah aktor politik dalam upaya merumuskan masa depan negara merdeka. Kemudian pada 27 Februari 1947, dalam Konferensi Panglong, tokoh-tokoh seperti Aung San dari Burman mayoritas dan pimpinan-pimpinan etnis minoritas, menyepakati perjanjian yang menekankan otonomi regional dan persatuan nasional berdasarkan landasan federal. Akan tetapi, pada 19 juli 1947 terjadi pembunuhan terhadap Aung San dan 6 anggota pemerintahan sementara AFPFL mengguncang proses transisi pada kemerdekaan dan peran Aung Sang beserta para anggota parlemen sementara digantikan oleh rekan mereka U Nu yang sebelumnya menjabat sekretaris jenderal AFPFL kini mengambil alih kepemimpinan politik menjadi kepala menteri pemerintahan sementara untuk meneruskan rencana kemerdekaan yang sudah direncanakan oleh Aung San.<sup>29</sup>

Kemudian pada 4 Januari 1948 Myanmar atau Burma berhasil memisahkan diri dari kekuasaan Kekaisaran Jepang, menjadikan Union of Burma negara federal demokratis yang dipimpin oleh U Nu sebagai Perdana Menteri pertama. Pada awal kemerdekaan ini hingga 14 tahun berjalannya dipenuhi dengan berbagai tantangan dengan kejadian terlama yakni terjadinya berbagai pemberontakan yang disebabkan

---

<sup>29</sup> *Myanmar profile - Timeline*. (2018). BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12992883> (diakses pada 19/08/25)

oleh komunis dari Tiongkok dan berbagai etnis, kelompok-kelompok tersebut meliputi Partai Komunis Burma (CPB), Organisasi Sukarelawan Rakyat (PVO) yang melakukan pemberontakan di wilayah perbatasan Myanmar dengan Tiongkok, beserta berbagai kelompok etnis beragam seperti pemberontakan kelompok etnis karen di wilayah selatan dan kelompok etnis kachin di wilayah utara karena menuntut kemerdekaan atas wilayah mereka atau federalisme otonomi atas wilayahnya,<sup>30</sup> konflik etnis tersebut telah terjadi sejak lama saat masa kekuasaan Inggris yang berawal dari kebijakan kolonial yang mengkotak-kotakan kelompok etnis dan menguntungkan sebagian kelompok tertentu.<sup>31</sup>

Faktor-faktor tersebutlah yang membuat pihak militer nasional pimpinan jenderal Ne Win merasa khawatir akan adanya ketidakstabilan pada negara, kondisi tersebut diperparah dengan adanya perpecahan kubu internal dalam partai AFPFL sehingga U Nu sebagai pemimpin politik tertinggi di Myanmar melibatkan pihak militer untuk membantu menstabilkan kondisi negara saat itu dengan membuat sistem pemerintahan transisi (*caretaker government*) yang dipimpin oleh Ne Win pada tahun 1958-1960 sebelum mengadakan pemilihan umum pertama Myanmar, akan tetapi ketika itu Ne Win menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan lawan atau pihak politik yang menghambat jalannya agar memperkuat posisi pihak militer dalam sistem pemerintahan akan tetapi stabilitas yang diberikan oleh Ne Win bersifat sementara.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Karen in Myanmar. (2002). Minority Rights. Diakses dari <https://minorityrights.org/communities/karen/> (diakses pada 19/08/25)

<sup>31</sup> Robert H. Taylor. (2009). *The State in Myanmar*. NUS Press. Hal. 247

<sup>32</sup> David I. Steinberg. (2013). *Myanmar yang bergerak: Masa depan kedudukan penting militer*. Kyoto Review. <https://kyotoreview.org/issue-14/myanmar-yang-bergerak-masa-depan-kedudukan-penting-militer/> (diakses pada 21/08/25)

Kemudian pada tahun 1960 setelah pemilihan umum yang dimenangkan oleh pihak AFPFI atau Partai Pembebasan Anti Fasis pihak U Nu mengambil kembali kendali kekuasaan yang dipimpin oleh U Nu sebagai perdana menteri dan menguasai kursi mayoritas di parlemen. Akan tetapi, saat pihak sipil kembali berkuasa, stabilitas sementara yang dilakukan oleh pihak militer atas penanganan pemberontakan pihak komunis dan pemberontakan kelompok-kelompok etnis kembali memanas dan muncul di perparah dengan kondisi ekonomi yang semakin tidak terkendali akibat infrastruktur yang rapuh.<sup>33</sup>

Berjalan 2 tahun pasca pemilihan umum yang dimenangkan oleh Ne Win, pihak militer kembali mengintervensi yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win untuk mengambil alih kembali kekuasaan yang mengakhiri era demokrasi parlemen U Nu disebabkan karena pihak militer atau Ne Win merasa pihak pemerintahan sipil pimpinan U Nu gagal dalam mengendalikan situasi politik yang semakin kacau dan gagalnya U Nu dalam menangani tuntutan etnis minoritas, kemudian ditambah dengan masyarakat sipil Myanmar saat itu telah kehilangan rasa percaya terhadap rezim demokrasi U Nu dikarenakan tidak mampu menstabilkan keadaan politik dan ekonomi negara yang serius sehingga pihak masyarakat sipil Myanmar merasa rezim tersebut sudah tidak *capable* dalam menjalankan pemerintahan.

Masyarakat merasa U Nu sebagai perdana menteri tidak sanggup menegakkan kembali hukum dan norma serta kabinetnya dianggap korup, lain halnya mereka merasa lebih percaya dan memberikan legitimasi tambahan pada

---

<sup>33</sup> Zaw Thein (2014). *Failure of Democracy of Democratic Consolidation: The Three Year Interlude of Military Rule (1958-1962) in Burma* [Thesis]. Western Michigan University .

pihak militer karena berhasil menstabilkan kondisi negara atas banyaknya pemberontakan dan masalah ekonomi pada tahun 1958 ketika Jenderal Ne Win memegang kekuasaan sebagai pemerintahan sementara.<sup>34</sup>

Berbagai faktor diatas merupakan runtutan penyebab kekecewaan masyarakat dan pihak militer pada pemerintahan U Nu, situasi semakin mendukung untuk menjadi awal pihak militer kembali berkuasa dalam pemerintahan, terutama pada pribadi Ne Win sendiri yang didesak oleh letnan-letnan nya di militer untuk merebut kekuasaan, mengingat keberhasilannya dalam menciptakan kestabilan negara sebelum U Nu kembali menjabat terutama Ne win merupakan salah satu orang kepercayaan dan andalan Aung San ketika di *Burma Indepence Army* ketika proses memperjuangkan kemerdekaan Burma di masa lampau.<sup>35</sup>

Pada 2 Maret 1962 merupakan puncak dimana akhirnya meletusnya kudeta yang dilaksanakan oleh pihak militer atas perintah Jendral Ne Win yang ketika itu menjabat sebagai kepala staf angkatan pertahanan burma merangkap sebagai menteri pertahanan saat itu menggulingkan rezim kekuasaan pemerintahan sipil U Nu, fenomena ini merupakan awal atas pihak militer yang akan memulai dominasinya dalam sistem pemerintahan Myanmar pada waktu yang cukup lama bahkan dampaknya masih terasa hingga kini di tubuh pemerintahan Myanmar.

Pada saat kudeta, situasi ketika itu cukup tenang tanpa adanya kekerasan ataupun represi dari pihak militer bahkan di sebut sebagai kudeta tanpa pertumpahan darah oleh media, akan tetapi realitasnya putra dari Sao Shwe Thaik

---

<sup>34</sup> Vum Son. (n.d.). *The Ne Win Doctrine: A Systematic Campaign of Hatred*. Chin Human Rights Organization. <https://www.chinhumanrights.org/the-ne-win-doctrine-a-systematic-campaign-of-hatred/> (diakses pada 24/08/25)

<sup>35</sup> *Ibid.*

yang merupakan presiden pertama Union of Burma dan orang yang berpengaruh di partai liga kebebasan rakyat anti fasis yakni Sao Mye Thaik tewas ditembak oleh tatmadaw, dan Sao Kya Seng yang juga merupakan politikus partai AFPFL dan juga seorang pangeran dari kerajaan Hsipaw dilaporkan menghilang saat kejadian kudeta berlangsung, Ne Win dan pihak militer juga menangkap U Nu. Setelah menyingkirkan U Nu dan pihak pro partai AFPFL, Rezim Ne Win membubarkan parlemen dan berpendapat saat itu bahwa Myanmar tidak cocok dengan sistem demokrasi parlementer.<sup>36</sup>

Pasca kudeta berjalan sukses, Ne Win membentuk dewan atau kabinet pemerintahannya yang akan memerintah negara Burma sosialis yakni Majelis Revolusioner Persatuan (*Union Revolutionery Council*) yang berisi para pejabat-pejabat militer dan di pimpin oleh Ne Win sebagai ketua URC, kemudian setelah 2 bulan dibentuknya URC, para anggota URC mengusulkan untuk pembentukan *Burma Socialist Programme Party* (BSPP) dan memperkenalkan ideologi *Burmese Way To Soscialism* yang mengatur unsur-unsur pemerintahan otoritarian seperti sektor ekonomi dinasionalisasi, media dalam kontrol rezim, serta sistem satu partai politik dan isolasi dari dunia internasional.<sup>37</sup>

### 2.1.1 Revolusi 8888

Pada saat Ne Win berkuasa dari awal hingga akhir masa kekuasaannya, Ne Win menggunakan ideologi *the burmese way to socialism* yang selama 26 tahun

---

<sup>36</sup> Memorandum From the Director, Far East Region (Heinz) to the Assistant Secretary of Defense For International Security Affairs (Nitze). (1962). *Office of The Historian*.

<sup>37</sup> *Sejarah Myanmar*. (n.d.). P2K Stekom. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sejarah\\_Myanmar](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sejarah_Myanmar) (diakses pada 24/08/25)

berkuasa memberikan dampak yang perlahan merusak kondisi sosial, ekonomi dan politik di dalam negeri atas kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik berdasarkan landasan ideologi tersebut. Ne Win mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bersifat kemandirian dengan sistem memenuhi kebutuhan negara sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain ataupun impor yang secara tidak langsung membatasi perdagangan internasional dengan harapan untuk kemajuan ekonomi mandiri akan tetapi mengakibatkan kemunduran ekonomi dan cenderung mengisolasi dari dunia internasional, salah satu dari beberapa kebijakan ekonomi Ne Win yang merupakan pilar utama ialah nasionalisasi massal industri.

Pada tahun 1963 Ne Win mengesahkan undang-undang yang menasionalisasi seluruh industri besar termasuk impor-ekspor, industri beras, perbankan, pertambangan, industri jati dan industri karet yang berjumlah sekitar 15.000 perusahaan swasta diambil alih negara. Selain itu negara juga melarang pihak swasta mendirikan pabrik baru, sehingga menghambat pertumbuhan sektor swasta, termasuk salah satu industri besar Burma yakni minyak yang pada periode sebelumnya dikuasai oleh perusahaan Amerika Serikat dan Inggris seperti General Exploration Company dan East Asiatic Burma Oil.

Kebijakan nasionalisasi industri oleh Ne Win secara langsung mengurangi pengaruh asing hingga bahkan bisa dikatakan menghilangkan pengaruh dari pihak-pihak asing terhadap dalam negeri Myanmar, Ne Win juga tidak lagi mengizinkan organisasi bantuan internasional atau asing untuk eksis di negaranya seperti For Foundation dan Asian Foundation bahkan Bank Dunia untuk tidak

beroperasi kembali di negaranya, bantuan-bantuan dari pihak asing hanya diizinkan apabila melalui antar pemerintah.

Pada kebijakan Ne Win yang berifat autarki ini juga memberi dampak pada pengusiran warga negara asing di Myanmar, terutama pada etnis Tionghoa dan India yang cukup berperan sebagai penerak pada sektor ekonomi Myanmar saat itu. Pada sektor pertanian, kejakan kontrol yang cenderung merusak pijhak petani di berlakukan oleh Ne Win dengan memaksa para petani menjual beras kepada pemerintah dengan harga yang cukup rendah, tujuan dari program tersebut agar menjaga harga pangan tetap rendah bagi para pekerja di perkotaan dan untuk ekspor, akan tetapi kebijakan tersebut malah mengurangi insentif secara aktif bagi petani untuk tetap menanam padi yang mengakibatkan terjadi penurunan angka produksi dan menciptakan kekurangan skala nasional.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh Ne Win mengakibatkan dampak buruk hingga menyebabkan penurunan ekonomi dan standar hidup secara signifikan. Dampak buruk dari kebijakan ekonomi autarki Ne Win hingga menyebabkan inflasi melonjak di Burma pada tahun 1971 akibat dari turunnya produksi dan perdagangan hingga menjadikan Burma sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan terlemah di Asia Timur saat itu.<sup>38</sup>

Semenjak Ne Win berkuasa pada tahun 1964 partai sosialis burma menjadi satu-satunya partai politik yang legal di Myanmar sehingga kebijakan politik ini semakin memperburuk keadaan situasi sosial dan politik Myanmar, serta kebebasan

---

<sup>38</sup> Laura Frankel. (n.d.). *Power & Money: Economics and Conflict in Burma*. Cultural Survival. <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/power-money-economics-and-conflict-burma> (diakses pada 25/08/25)

untuk berekspresi dan mengadakan perkumpulan juga sangat dibatasi, pada kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya kebijakan Ne Win yang sangat menekankan budaya burma yang kental akan buddhisme baik pada sistem sekolah nasional, budaya populer dan militernya yang semakin memperparah ketegangan dan konflik pada etnis-etnis yang ada terutama etnis minoritas.<sup>39</sup>

Kegagalan sistematis pada ideologi *Burmanese Way To Socialism* yang berpengaruh besar pada kebijakan-kebijakan Ne Win menyebabkan berbagai dampak yang runtut dan struktural, dimulai dari kebijakan ekonomi yang menutup dari dunia luar dan nasionalisasi yang membuat Myanmar ketika itu merupakan lumbung beras asia berubah menjadi salah satu negara termiskin serta kebijakan-kebijakan sosial dan politik yang seras akan nilai buddhisme justru tidak berhasil menyatukan antar etnis akan tetapi semakin memperparah kerusakan diantaranya.<sup>40</sup>

Masalah ekonomi di Burma telah kronis selama bertahun-tahun di bawah program ideologi "Jalan Burma Menuju Sosialisme" kebijakan demonetisasi yang dilakukan oleh Ne Win pemicu langsung yang mempercepat krisis dan memicu kemarahan publik yang meluas. Pada tahun 1985, Ne Win mendeklarasikan uang kertas kyat nominal besar tidak lagi berharga. Kebijakan tersebut membuat 70% mata uang yang beredar tidak lagi berlaku, yang secara tidak langsung menghapus tabungan masyarakat hilang dalam sekejap dan situasi tersebut semakin memperburuk inflasi yang terjadi. Dampak tersebut yang menjadikan awal

---

<sup>39</sup> Memorandum From the Director, Far East Region (Heinz) to the Assistant Secretary of Defense For International Security Affairs (Nitze). (1962). *Office of The Historian*.

<sup>40</sup> Aparupa Bhattacharjee. (2018). *The 8888 Uprising: Thirty Years Later*. Global Politics. [https://globalpolitics.in/view\\_cir\\_articles.php?url=Myanmar&recordNo=137](https://globalpolitics.in/view_cir_articles.php?url=Myanmar&recordNo=137) (diakses pada 25/08/25)

kemarahan para mahasiswa karena dirasakan langsung sehingga menjadi pemicu kemarahan dan langkah awal protes.<sup>41</sup>

Ketidakpuasan publik semakin parah atas perilaku korupsi rezim Ne Win dan brutalitas polisi yang merajalela, pada 13 Maret 1988 terjadi perkelahian yang menimbulkan reaksi agresif dari pihak keamanan hingga menewaskan tiga mahasiswa, kejadian itu menjadi awal pemicu kemarahan kalangan mahasiswa yang pada akhirnya berubah menjadi tindakan, berita mengenai kematian ketiga mahasiswa atas tindakan kekerasan pasukan keamanan tersebut menyebar dengan cepat, mendorong mahasiswa untuk bersolidaritas dan memulai protes untuk menuntut pertanggungjawaban. Protes yang dimulai oleh para mahasiswa menyebar luas ke berbagai kota dan menyebabkan lebih banyak korban jiwa demonstran pada bulan Juni.<sup>42</sup>

Peristiwa kematian para mahasiswa yang disebabkan oleh tindakan brutal dari pihak keamanan saat terjadi kericuhan di wilayah perkuliahan tersebut menjadi *trigger* protes atau demonstrasi yang umumnya terjadi secara spontan dan cenderung berskala kecil menjadi pada wilayah-wilayah penjurua Burma.

---

<sup>41</sup> Eli Meixler. (2018). *How a Failed Democracy Uprising Set the Stage for Myanmar's Future*. Time. <https://time.com/5360637/myanmar-8888-uprising-30-anniversary-democracy/> (diakses pada 25/08/25)

<sup>42</sup> MYANMAR 1988 TO 1998 HAPPY 10TH ANNIVERSARY? (1998). *Amnesty International*.



**Gambar 2.1 Kondisi demonstrasi saat revolusi 8888 di Yangon (1988)**

**Sumber:** Time.com

Gelombang protes terus berlanjut dan meluas di seluruh penjuru negeri. Hingga puncaknya pada tanggal 23 bulan juli 1988 Ne Win mengundurkan diri sebagai kepala pemerintahan, namun Ne Win menunjuk Jenderal Sein Lwin sebagai penggantinya untuk memimpin pemerintahan yang menjadi kontroversial saat itu, sebabnya Sein Lwin sangat dibenci oleh masyarakat dan dikenal sebagai seorang jagal Yangoon yang kejam, dan dalam pidato terakhirnya Ne Win mengatakan bahwa setelah ini tentara akan menembak untuk membunuh para demonstran yang meneruskan pergerakannya, dengan di perparah Sein Lwin memberlakukan darurat militer untuk memperjelas penumpasan perbedaan pendapat dengan cara kekerasan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Eli Meixler. (2018). *How a Failed Democracy Uprising Set the Stage for Myanmar's Future*. Time. <https://time.com/5360637/myanmar-8888-uprising-30-anniversary-democracy/> (diakses pada 26/08/25)

Penunjukan Sein Lwin ketika itu bukanlah untuk memberikan harapan cerah bagi masyarakat. Akan tetapi, menekankan akan keberlanjutan dan kontrol rezim militer yang telah mengakar di Burma. Gelombang protes tetap berlanjut hingga 8 agustus 1988 yang merupakan hari puncak yang dikenal sebagai revolusi 8888 dengan adanya seruan mogok umum nasional dan demonstrasi massal berskala nasional yang serentak, menandai puncak protes yang telah berkelanjutan selama berbulan-bulan yang serentak dilakukan oleh berbagai kalangan dari mulai warga sipil, biksu bahkan militer yang tidak pro dengan pihak Sein Lwin. Menandai momen pertama kalinya berbagai lapisan masyarakat bersatu untuk melawan pemerintah akibat dari kemarahan dan ketidakpuasan publik sejak lama, demonstran menuntut adanya demokrasi multipartai dan kepedulian lebih terhadap nilai hak asasi manusia yang mengharapkan perubahan pada sistem politik dan sosial.

Hari revolusi tersebut juga tidak semata terjadi secara spontan. Akan tetapi dipilih karena dalam kepercayaan buddhisme angka delapan merupakan keberuntungan serta semakin memberikan legitimasi moral dan spiritual dengan bergabungnya pihak biksu, sehingga menunjukkan bahwa gerakan revolusi ini tidak sekedar tuntutan politik semata tetapi memiliki nilai-nilai budaya dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Demonstrasi revolusi 8888 berakhir dengan bergeraknya pihak militer pemerintahan baru atas perintah kejam Sein Lwin untuk menumpas demonstran

---

<sup>44</sup> Nicholas Birns. (2023). *Auspicious Day of 8/8/88 Turns Deadly in Rangoon*. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/auspicious-day-8888-turns-deadly-rangoon> (diakses pada 24/08/25)

secara brutal, dilaporkan ketika itu ribuan warga tewas dengan perkiraan jumlah sebanyak 3000 hingga 10.000 jiwa. Akan tetapi pihak keamanan mengklaim hanya 350 demonstran yang menjadi korban pihak mereka, para demonstran tersebut banyak dilaporkan tewas akibat ditembak mati saat melakukan aksi protes damai, selain itu banyak dari mereka yang dilaporkan dipenjara, disiksa dan dihilangkan secara paksa oleh rezim Sein Lwin, berdasarkan laporan kejadian saat itu para tawanan demonstrasi ini mengalami praktik-praktik penyiksaan yang melanggar hak asasi manusia berupa luka bakar, pemukulan dan penggunaan sengatan listrik oleh pihak keamanan atau militer ketika itu.<sup>45</sup>

### **2.1.2 Peralihan Rezim Pasca Revolusi**

Pasca tragedi penumpasan demonstrasi revolusi 8888 dengan penuh kebrutalan pihak militer yang memakan hingga ribuan korban tewas dan menghilang, aspek tersebut masih menunjukkan bahwa rezim militer dibawah kekuasaan Sein Lwin tetap menggunakan kekerasan sebagai senjata dan memberikan kesan menakutkan pada masyarakat masih menjadi strategi utama mereka. Pihak militer yang berkuasa masih konsisten menggunakan strategi memberikan ketakutan dari tahun 1962 era Ne Win hingga Sein Lwin berkuasa untuk memadamkan perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah serta mencegah mobilisasi massa di masa mendatang, meskipun hal tersebut dibayar dengan nilai kemanusiaan yang besar dan isolasi internasional.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Benjamin Zawacki. (2008). *No moving backwards for Myanmar*. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2008/08/no-moving-backwards-myanmar-20080808/> (diakses pada 26/08/25)

<sup>46</sup> MYANMAR 1988 TO 1998 HAPPY 10TH ANNIVERSARY? (1998). *Amnesty International*.

Pada tanggal yang berpetepatan dengan adanya puncak revolusi tersebut juga hari diaman Sein Lwin mengkahiri masa kekuasaannya yang sangat singkat. Tampuk kekuasaan di berikan kepada Maung Maung yang ketika itu menjabat sebagai ketua mahkamah agung dan anggota komite partai sosialis burma, ketika itu Maung menjadi harapan masyarakat Burma untuk mengarahkan pemerinatahan menuju demokratis, didukung dengan munculnya Aung San Suu Kyi yang meruapkan putri pahlawan kemerdekaan Burma, berperan sebagai tokoh pro demokrasi. Akan tetapi, harapan transisi menuju demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat Burma tidak berselang lama, tidak berselang lama pada 18 september 1988 pihak militer kembali menegaskan kontrol penuh atas kekuasaan, dengan melakukan kudeta atas Maung yang dipimpin oleh Jenderal Saw Maung.<sup>47</sup>

Pada 23 September 1988 tepat 5 hari pasca militer melakukan kudeta, Jenderal Saw Maung membentuk junta militer baru yang dikenal dengan *State Law and Order Restoration Council (SLORC)* berisikan 19 dewan berasal dari militer, yang secara efektif membubarkan struktur politik sebelumnya termasuk Partai Sosialis Burma (BSPP) yang berkuasa dibawah Ne Win sebelumnya. Saw Maung langsung memberlakukan darurat militer dengan membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul yang saat itu secara efektif segera menumpas para pro demokrasi.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Nicholas Birns. (2023). *Auspicious Day of 8/8/88 Turns Deadly in Rangoon*. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/auspicious-day-8888-turns-deadly-rangoon> (diakses pada 26/08/25)

<sup>48</sup> *HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR*. (n.d.). Amnesty. <https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/2021/06/asa160101990en.pdf> (diakses pada 26/08/25)

Kemudian pada tahun 1989 lahirlah oposisi bagi junta, yakni *National League Democration* (NLD) pimpinan Aung Suu Kyi yang pro demokrasi. Pada tahun yang sama juga Saw Maung mengubah nama Burma menjadi Myanmar untuk memberikan kesan baru, memulihkan legitimasi, dan menghilangkan kesan rezim Ne Win, berlanjut ketika SLORC menjanjikan adanya pemilihan umum multipartai pada tahun 1990 terhadap NLD. Namun, ketika terjadinya pemilihan tersebut pihak NLD memenangkan sebagian besar kursi dalam pemilu tersebut, pihak junta secara spontan membatalkan hasil tersebut dan kembali terjadi gelombang represi baru dan ditahannya Aung Suu Kyi tanpa hukum alasan yang jelas. Membuktikan bahwa pemilihan tersebut hanya memberikan harapan bagi pro demokratis yang sebenarnya tidak bermaksud mengalihkan kekuasaan absolut atas militer.<sup>49</sup>

Revolusi 8888 mengalami kegagalan dalam menggulingkan rezim militer dan menyingkirkan dominasi partai militer untuk menuju demokrasi sudah dipastikan dengan kembalinya SLORC yang merupakan BSPP model baru telah efektif berkuasa dan bertindak represif akan demokrasi. Akan tetapi revolusi tersebut menjadi titik balik yang membentuk jalur bagi perjuangan demokrasi di Myanmar.

Kekuasaan SLORC setelah itu melanjutkan prinsip dominasi yang sama dengan BSPP pimpinan Ne Win, hanya saja SLORC berisikan personel baru dan formula aturan baru yang tetap melanjutkan sejarah kekuasaan militer di Myanmar. Ketika Saw Maung berkuasa Myanmar mengalami pergeseran ideologi menuju

---

<sup>49</sup> Laura Frankel. (n.d.). *Power & Money: Economics and Conflict in Burma*. Cultural Survival. <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/power-money-economics-and-conflict-burma> (diakses pada 26/08/25)

kapitalisme yang menunjukan rezim baru beradaptasi dan mencari legitimasi baru terutama dunia internasional, meskipun faktanya pemerintah tetap mempertahankan kontrol atas bisnis dan produk devisa utama. Pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar mengalami keberlanjutan pasca revolusi tahun 1988, pihak militer melakukan pelanggaran HAM secara luas dan sistematis terhadap kelompok etnis minoritas termasuk pembunuhan diluar hukum, penyiksaan, kerja paksa dan penangkapan secara semena-mena, contohnya pada etnis rohingya yang mengakibatkan ratusan ribu orang harus mengungsi mencari perlindungan di negara lain.<sup>50</sup>

### **2.1.3 Titik Awal Kudeta Militer Tahun 2021**

Myanmar mengalami periode transisi demokrasi yang tidak absolut atau tidak murni demokrasi dari tahun 2011 hingga 2021 dikarenakan tatmadaw (militer) tetap ikut campur. Meskipun ada pergeseran pada pemerintahan sipil pada tubuh pemerintahan Myanmar, militer tetap memiliki andil yang cukup karena pihak militer mempertahankan peran konstitusional dengan adanya jaminan alokasi 25% kursi parlemen bagi militer dan kontrol atas kementerian pertahanan, dalam negeri dan juga perbatasan, sehingga memberikan cukup suara dalam militer dalam kebijakan dan memiliki kemampuan dalam mengintervensi apabila hasil pemilu mengancam kepentingan militer.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> BURMA (Myanmar). (n.d.). HRW. <https://www.hrw.org/reports/1989/WR89/Burma.htm> (diakses pada 27/08/25)

<sup>51</sup> Elizabeth Mohn. (2024). *2021 Myanmar protests*. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/military-history-and-science/2021-myanmar-protests> (diakses pada 27/08/25)

Selama periode transisi menuju demokras dari tahun 2010 hingga 2021, NLD mendominasi pemilihan umum, sehingga mengakibatkan hubungan antara sipil dengan militer memburuk setelah kemenangan beruntut oleh NLD terutama pada pemilu 2015. Ketegangan hubungan antara keduanya semakin parah atas dasar pada Maret 2020, NLD mendorong perubahan konstitusi yang bertujuan mencabut kekuasaan politik pihak militer. Langkah tersebut dipandang sebagai ancaman langsung pada pengaruh militer yang telah mengakar, kemudian pada pemilihan umum November tahun 2020 , NLD kembali meraih kemenangan telak dengan memenangkan 396 kursi dari 476 kursi parlemen, bahkan kemenangan ini lebih besar jika dibandingkan dengan kemenangan NLD tahun 2015, sehingga hanya menyisakan 33 kursi bagi partai militer (Partai Solidaritas dan Pembangunan Uni - USDP).<sup>52</sup>

Kemenangan besar NLD pada pemilihan ini semakin mengancam posisi militer dalam parlemen dan pemerintahan baru, sehingga militer dan USDP, mengklaim telah mengidentifikasi kecurangan dan ketidakbenaran dalam daftar pemilih yang menurut pihak militer merusak keadilan proses serta hasil pemilihan tahun 2020. *Union Solidarity and Development Party* (USDP) mengajukan sebanyak 174 kasus dugaan pelanggaran pada komisi pemilihan umum dan militer menyebut adanya 8 juta ketidakbenaran dalam daftar pemilih di 314 kota. Akan tetapi, tidak memberikan bukti konkret untuk tuduhan tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Darin Self. (2021). *Myanmar Lays Bare Challenges of Military-Led Democratization*. Relief Web International. <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-lays-bare-challenges-military-led-democratization> (diakses pada 27/08/25)

<sup>53</sup> Thibaut Noel. (2022). UNCONSTITUTIONALITY OF THE 2021 MILITARY COUP IN MYANMAR: CONSTITUTION BRIEF INTERREGNUM SERIES. *International Idea*.

Pada 29 Januari 2021, Komisi Pemilihan Umum (UEC) menolak tuduhan militer dengan alasan tidak adanya kesalahan pada kredit hasil pemilihan, para pengamat indepen juga secara konsisten mengonfirmasi bahwa pemilihan hasilnya aman dan akurat dengan pemilih dapat secara bebas mengungkapkan keinginan mereka. Sebenarnya motif dibalik kudeta militer pada 2021 sendiri bisa dikatakan jauh melampaui klaim kecurangan pemilihan, melainkan ambisi serta kepentingan institusional dan pribadi militer.

Secara pribadi pimpinan militer yakni Jenderal Aung Hlaing melindungi kepentingan bisnis keluarga dekatnya, karena berdasarkan laporan Aung Hlain memiliki 2 korporasi besar yang bergerak pada ekonomi dan substansial, sehingga Aung Hlaing takut akan potensi pengawasan atau reformasi sistem dibawah pemerintahan sipil serta ditambah juga pada juli 2021 Aung Hlain akan memasuki masa pensiun, Aung Hlaing khawatir akan adanya rencana pemerintahan sipil mengganti posisi pimpinan militer dengan orang yang lebih pro demokrasi yang berpotensi melemahkan cengkram kekuasaan militer pada sistem politik Myanmar dan lebih lanjutnya Aung Hlaing juga khawatir setelah pensiunnya dari militer, pihak pemerintahan sipil akan mengekspos potensi tuntutan hukum dan akuntabilitas dirinya atas dugaan kejahatan perang pada konflik etnis rohingnya di pengadilan internasional.<sup>54</sup>

Secara institusional militer atau tamadaw juga memiliki ketidakpercayaan pada pemerintahan sipil dan Partai NLD, ketidakpercayaan yang telah mengakar

---

<sup>54</sup> *Connecting the Dots: Ne Win and Min Aung Hlaing's Role in Myanmar's Military Legacy*. (n.d.). MSC. <https://msc.upol.cz/nc/zprava/clanek/connecting-the-dots-ne-win-and-min-aung-hlaings-role-in-myanmars-military-legacy/> (diakses pada 28/08/25)

terhadap sipil dan obsesi pada loyalitas militer. Popularitas Aung Suu Kyi yang semakin tinggi bahkan di dunia internasional, membuat militer sendirinya merasa khawatir bahwa anggota Tatmadaw mungkin telah memilih NLD bukan USDP yang mengindikasikan potensi pembangkangan interna yang ingin dikendalikan tanpa pengawasan sipil. Pihak militer tidak siap menerima hasil demokrasi yang melucuti pengaruh, kendali dan kekuasaan militer, dengan ditambah militer sangat berpegang teguh pada doktrin tiga tujuan nasional yang dijadikan Aung Hlaing sebagai spirit bagi militer pimpinannya untuk mengeklaim bahwa kegagalan dalam mengatasi dugaan kecurangan dalam pemilihan merupakan mengganggu tujuan nasional dan menunjukkan ketakutan terhadap pengaruh eksternal serta mencerminkan isolasionalisme pada era Ne Win.<sup>55</sup>

Kemenangan telak NLD pada pemilihan tersebut seakan menjadi titik balik bagi militer untuk menyimpulkan bahwa sistem demokrasi terbatas rancanagna mereka tidak lagi bisa untuk melindungi kepentingan militer dibawah bendungan dominasi NLD. Klaim kecurangan yang di gunakan sebagai dalih oleh militer tidak lagi membenarkan tindakan mereka dan mennjadi alasan utama melakukan kudeta. Melainkan motif yang lebih dalam daripada itu yakni agar mempertahankan peran sentralnya dalam sistem politik Burma serta melindungi kepentingan pribadi pimpinan tertinggi Tatmadaw kala itu. Kudeta pada tahun 2021 merupakan sebagai tindakan preventif untuk menghindari erosi kekuasaan lebih lanjut dan konsolidasi sebelum NLD membentuk pemerintahan baru yang berpotensi menentang

---

<sup>55</sup> Arthur Swan Ye Tun. (2021). *Why Did the Tatmadaw's 'War Fighters' Seize Power?* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/02/why-did-the-tatmadaws-war-fighters-seize-power/> (diakses pada 29/08/25)

preokratif militer pada sistem pemerinatahan, serta tindakan ini juga melindungi individu atau segelintir struktural militer yang telah diuntungkan berkat sistem militer yang korup. Kejadian ini juga menyoroti bahwa transisi demokrasi yang mengikat rancangan militer pada akhirnya tidak lagi efektif dan berlanjut ketika pihak sipil mulai menentang status militer.<sup>56</sup>

## **2.2 Profil Rezim Junta Dari Masa Ke Masa Dan Hubungannya Dengan Masyarakat Sipil**

Myanmar sendiri memiliki sejarah panjang pada dominasi militer yang berkelanjutan sejak meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1948, Tatmadaw menjadi aktor politik berpengaruh dalam sistem kenegaraan di Myanmar. Sejak tahun 1962, Myanmar telah berada di bawah kekuasaan militer otoriter yang membenarkan tindakannya dengan klaim sebagai penyelamat negara dari ketidakstabilan yang terjadi, doktrin tersebut telah mengakar dalam institusional Tatmadaw yang akan menjadikan mereka berperan sebagai satu-satunya pelindung utama persatuan nasional.<sup>57</sup>

Berdasarkan pola dari intervensi militer yang terjadi di Myanmar bukanlah sekedar fenomena sekilas melainkan sudah menjadi siklus berulang yang telah terjadi sejak kemerdekaan Burma dengan adanya kudeta pada tahun 1958, 1962, 1988 dan 2021. Sehingga menunjukkan bahwa pola tersebut bukan hanya mengenai

---

<sup>56</sup> Darin Self. (2021). *Myanmar Lays Bare Challenges of Military-Led Democratization*. Relief Web International. <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-lays-bare-challenges-military-led-democratization> (diakses pada 27/08/25)

<sup>57</sup> Rebecca Ratcliffe. (2025). *Myanmar civil war: a quick guide to the conflict*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2025/jan/31/why-is-myanmar-embroiled-in-conflict> (diakses pada 29/08/25)

perebutan kekuasaan, tetapi mencerminkan keyakinan mendalam pada militer bahwa mereka merupakan penjaga negara dan satu-satunya pihak yang dapat menjaga atau memberikan persatuan di tengah perpecahan dan konflik etnis yang berkepanjangan di Myanmar sejak awal. Pemahaman tersebut seakan memberikan gambaran bahwa dominasi militer adalah masalah struktural dan ideologis mendalam pada internal Myanmar. Oleh karena itu ideologi dan ambisi militer menjadikan salah satu aspek utama atas bertahannya rezim militer yang mendominasi secara berkelanjutan dan penyebab terhambatnya upaya demokratisasi di Myanmar.

### **2.2.1 Profil Rezim Junta Militer Tiap Masa**

Pada masa Dewan Revolusi/ *Union Revolutionary Council (URC)*, dewan yang terdiri dari beberapa perwira tinggi yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win memerintah tanpa landasan konstitusional. Pada saat itu juga Ne Win membubarkan parlemen serta militer menguasai hingga pemerintahan lokal menggantikan aparat sipil, melarang semua partai politik yang tidak setia terhadap junta, berlanut dengan kontrol ketat kehidupan publik seperti kebebasan pers, berkumpul dan pendapat ditekan melalui sensor dan menghukum siaran atau publikasi yang mengkritik rezim. Sehingga hubungan dengan masyarakat sipil dengan tatmadaw pada rezim Ne Win buruk, dikarenakan masyarakat sipil tidak mempunyai ruang politik serta rezim menghindari diskusi demokratis dan menekan segala bentuk protes, kemudian di perparah dengan perumusan konstitusi baru 1974 yang semakin memperkuat posisi militer.

Pada masa Partai Sosialis Burma/Burma Socialist Programme Party (BSPP) dari tahun 1974 hingga 1988, terjadi pergeseran dari Dewan Revolusi pada pemerintahan satu partai yang tetap dipimpin oleh Ne Win sebagai ketua BSPP dan Presiden, dengan sistem pemerintahan berbasis majelis tunggal yang diisi oleh para loyalis militer pilihan Ne Win. Pada masa ini diberlakukan sistem *Blacklist* terhadap oposisi yang menentang rezim, seperti pada Aung San Suu Kyi yang ditahan berulang kali, bahkan Ne Win memberlakukan sensor pada sejarah negara dan ajaran agama agar tidak mengkritik pemerintahan kekuasaannya, berlanjut dengan masyarakat sipil akan dianggap berkhianat terhadap negara apabila memberikan tuntutan reformasi dengan penangkapan dan penahanan.<sup>58</sup>

Pada 18 September 1988, enam bulan pasca gejolak revolusi militer kembali mengambil alih kekuasaan dengan dipimpin oleh Mayor Jenderal Saw Maung melakukan kudeta terhadap pemerintahan BSPP bentukan Ne Win. Saw Maung membentuk *State Law and Order Council (SLORC)* dengan langkah awal segera menangguhkan konstitusi 1974 dan memberlakukan status darurat. Saw Maung dan SLORC menjanjikan akan adanya pemilihan umum multi partai pada Mei 1990 sebagai awalan peralihan menuju demokrasi.<sup>59</sup>

Partai pro demokrasi bentukan Aung San Suu Kyi diperbolehkan berdiri dan mengikuti pemilihan. Akan tetapi setelah partai pro demokrasi NLD memenangkan telak pemilihan umum sebanyak tiga perempat kursi parlemen secara tiba-tiba junta membatalkan hasil pemilihan, kemudian berlanjut dengan penahanan massal

---

<sup>58</sup> Robert H. Taylor. (2009). *The State in Myanmar*. NUS Press. Hal. 309

<sup>59</sup> David I. Steinberg. (2010). *Burma/Myanmar*. Oxford University Press. Hlm 69-70.

aktivis dan ribuan tahanan politik tanpa diadli. Berlanjut dengan SLORC menerbitkan berbagai undang-undang dan aturan baru untuk meredam protes atas tindakan junta, secara tidak langsung masyarakat tidak lagi memiliki suara seperti masa sebelumnya dan segala bentuk diskusi publik yang menentang rezim diancam dengan diberikan hukuman berat bagi siapapun yang melakukannya, serta SLORC juga melakukan perundingan damai dengan kelompok separatis etnis, akan tetapi tetap dilancarkan dengan adanya pelanggaran hak asasi di wilayah perseteruan tersebut.<sup>60</sup>

Kemudian pada November 1997 SLORC berganti nama menjadi *State Peace and Development Council (SPDC)* yang berganti kepemimpinan oleh Jenderal Than Shwe dengan struktur pemerintahan yang tetap sama atas kendali junta. Than Shwe dan para kabinet jenderal setuju untuk memberi sedikit kelonggaran kontrol pada masyarakat sipil atas desakan diplomatik internasional.<sup>61</sup>

Namun pada realitanya pelanggaran terhadap oposisi tetap berlanjut, pada 2003 di Depayin junta melakukan pembantaian terhadap oposisi dan pada 2007 terjadi gerakan *Saffron Revolution* yang diprakarsai oleh para biksu Buddha, junta menembaki demonstrasi aksi protes tersebut hingga menewaskan ratusan ribu yang didominasi biksu, serta menangkap paksa penduduk desa yang dianggap tidak tunduk pada junta sehingga di curigai mendukung pemberontak dan melanjutkan praktik diskriminasi pada etnis minoritas berupa membatasi pembangunan

---

<sup>60</sup> *Burma's Forgotten Prisoners.* (2009). Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/report/2009/09/16/burmas-forgotten-prisoners> (diakses pada 05/09/25)

<sup>61</sup> *Taking Aim at the Tatmadaw: The New Armed Resistance to Myanmar's Coup.* (2021). International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/asia-pacific/myanmar/b168-taking-aim-tatmadaw-new-armed-resistance-myanmars-coup> (diakses pada 09/09/25)

infrastruktur di daerah suku tertentu dan menyiksa tahanan politik yang berasal dari etnis minoritas.

Kemudian pada Februari 2021 militer kembali melakukan pengambilan paksa kekuasaan dengan membekukan konstitusi 2008 dan memberlakukan keadaan darurat nasional. Panglima Tatmadaw yakni Jenderal Min Aung Hlaing menjadikan dirinya sebagai pimpinan tertinggi Myanmar dan membentuk dewan pemerintahan baru serta mengangkat dirinya dengan jabatan sebagai ketua Dewan Administrasi Negara/ *State Administration Council (SAC)*, langkah awal menempatkan perwira Tatmadaw ke pemerintahan tertinggi yang dilanjut dengan penahanan terhadap pemerintahan sipil yang menjabat yakni Presiden Win Myint dan Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin partai demokrasi NLD tanpa proses pengadilan.<sup>62</sup>

*SAC* mengambil kekuasaan total dengan cara kekerasan, militer membombardir desa-desa yang diduga mendukung protes dan kelompok etnis bersenjata, kemudian militer juga melakukan tindakan represif untuk menanggapi demonstran dengan korban jiwa ratusan orang tewas tiap bulan pada 2021 dan diperkirakan sekitar 6.000 korban berjatuh atas tindakan tersebut. Militer juga menutup ruang bebas masyarakat sipil seperti akses protes dibungkam, organisasi oposisi dibubarkan paksa, pelarangan pertemuan publik tanpa izin pihak militer dan pengangkutan paksa warga sipil ke kamp tahanan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Myanmar: Four years after coup, world must demand accountability for atrocity crimes. (2025). Amnesty. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/01/myanmar-four-years-after-coup-world-must-demand-accountability-for-atrocity-crimes/#:~:text=Since%20the%202021%20coup%2C%20Myanmar%E2%80%99s,aid%2C%20which%20may%20amount%20to> (diakses pada 29/08/25)

Sejak kudeta 1962 hingga kini, hubungan antara militer dan masyarakat sipil di Myanmar lebih sering bersifat konfrontatif daripada kooperatif. Setiap periode junta menunjukkan pola yang sama: represi, kooptasi, dan pembatasan ruang sipil. Perbedaan hanya terletak pada strategi dan bentuk legalitas yang digunakan. Dari ideologi sosialisme Ne Win, sistem partai tunggal BSPP, represi terbuka SLORC, rekayasa hukum SPDC, hingga kekerasan brutal SAC, militer konsisten menempatkan dirinya sebagai kekuatan dominan di atas masyarakat. Akibatnya, masyarakat sipil Myanmar berkembang dalam kondisi represi, tetapi juga membangun tradisi perlawanan yang berulang kali muncul dalam momen krisis. Dengan kata lain, sejarah hubungan sipil-militer Myanmar adalah sejarah tentang hegemoni militer dan perjuangan masyarakat sipil untuk merebut ruang politik yang berulang kali dirampas.

Pandangan militer mulai tertanam pada peran historis mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan dan klaim untuk mencegah disintegrasi di tengah konflik etnis berkepanjangan di Myanmar dan ketika dikombinasikan dengan narasi kegagalan pemerintahan sipil ketika awal memerintah, sehingga fenomena tersebut menciptakan legitimasi yang kuat bagi militer untuk membenarkan intervensi politik secara terus-menerus, dengan sampel fenomena kudeta terakhir yang terjadi di Myanmar ketika tahun 2021. Min Aung Hlaing sebagai pimpinan kudeta menyatakan secara terbuka memiliki keyakinan serupa dengan pendahulunya yakni Ne Win yang beranggapan bahwa demokrasi tidaklah cocok untuk diterapkan di Myanmar dan militer harus mempertahankan persatuan nasional. Narasi itu menjadikan penghalang bagi kontrol sipil, sehingga selama militer meyakini

mereka merupakan satu-satunya pihak yang dapat menjaga persatuan dan stabilitas, maka selama itu juga pihak militer memandang pemerintahan sipil yang kuat sebagai ancaman bukan sebagai kolaborator yang sah.<sup>64</sup>

Selain kekuatan politik yang terstruktur, militer juga menguasai sektor ekonominya melalui dua konglomerat utama mereka yakni Myanmar Economic Holding Public Company Ltd (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC) yang dikuasai dan dikontrol oleh Tatmadaw. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki setidaknya 106 bisnis di berbagai lini sektor termasuk perbankan, konstruksi, pertambangan giok dan rubi, manufaktur, asuransi, pariwisata, tembakau dan makanan.<sup>65</sup>

Pendapatan yang dihasilkan dari MEHL dan MEC secara signifikan memperkuat kemandirian finansial pihak militer dari pengawasan sipil, sehingga memungkinkan mendanai operasi dan mempertahankan posisi mereka tanpa akuntabilitas publik. Bahkan, para tentara diwajibkan menginvestasikan sebagian gaji mereka di saham MEHL, grup korporasi ini juga terlibat dalam kemitraan yang menguntungkan dengan gembong narkoba dan memiliki akses eksklusif pada kontrak potensial dengan perusahaan asing, dengan sebagian besar investasi asing langsung di Burma dilakukan melalui *joint venture* dengan MEHL.<sup>66</sup>

---

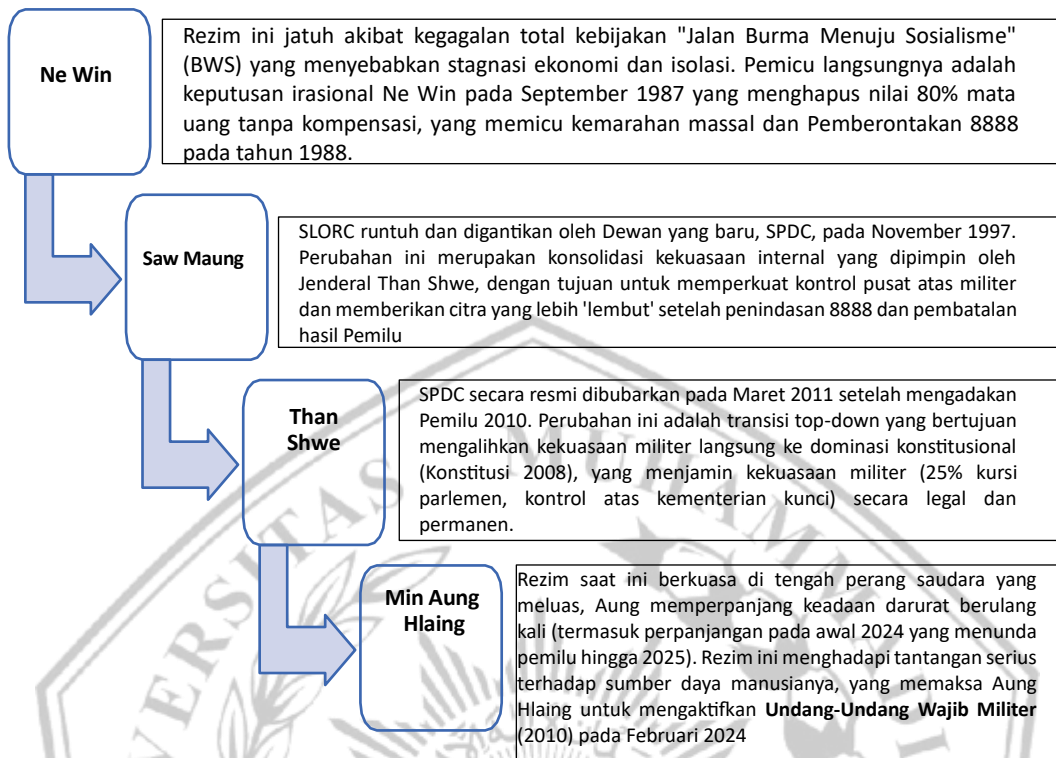
<sup>64</sup> *Connecting the Dots: Ne Win and Min Aung Hlaing's Role in Myanmar's Military Legacy*. (n.d.). MSC. <https://msc.upol.cz/nc/zprava/clanek/connecting-the-dots-ne-win-and-min-aung-hlaings-role-in-myanmars-military-legacy/> (diakses pada 28/08/25)

<sup>65</sup> *Fact Sheet*. (2019). United Nations Human Rights Council.

<sup>66</sup> Hunter Marston. (2021). *Analysis: Why is Myanmar's military so powerful?* Al-Jazeera. <https://www.aljazeera.com/features/2021/2/2/analysis-why-is-myanmar-military-so-powerful> (diakses pada 30/08/29)

Konstitusi 2008 yang diberikan pada Myanmar oleh militer sebagai langkah menuju demokrasi, sebenarnya adalah instrumen yang dirancang dengan cermat oleh militer untuk mengabadikan kekuasaan mereka secara legal, langkah tersebut bukan hanya tentang kursi di parlemen atau kendali kementerian tetapi juga klausul kudeta yang memberikan egimitasi secara *de jure* untuk intervensi militer. Serta kontrol ekonomi melalui MEHL dan MEC memberikan militer kebebasan dalam finansial yang signifikan, membebaskan mereka dari kebutuhan akuntabilitas sipil sehingga memungkinkan mereka secara bebas membiayai operasi tanpa pengawasan, yang kemudian menciptakan sistem dimana militer tidak hanya memiliki kekuatan politik tetapi kemandirian ekonomi juga, membuat kontrol sipil menjadi tindakan yang sangat tidak mungkin terjadi karena militer tidak bergantung pada anggaran yang disetujui oleh sipil. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi transisi demokrasi tersebut adalah ilusi.

### Grafik 2.1 Timeline Kudeta Masa ke Masa



### 2.2.2 Dinamika Hubungan Pada Era Transisi Demokrasi Terbatas

Tabel 2.1 Transisi Kekuasaan di Myanmar

Pimpinan	Kebijakan	Tahun Berkuasa
Ne Win (Union Revolutionary Council)	Menggulingkan pemerintahan U Nu pada Maret 1962. Memperkenalkan ideologi "Jalan Burma Menuju Sosialisme" menetapkan sistem satu-partai di bawah Partai Program Sosialis Burma. Melakukan nasionalisasi ekonomi dan menerapkan kebijakan Burmanisasi yang keras, memicu pemberontakan etnis. Demonetisasi mata uang pada	1962-1988

Pimpinan	Kebijakan	Tahun Berkuasa
	September 1987 yang menghancurkan tabungan publik sebagai pemicu Pemberontakan 8888	
Saw Maung (State Law and Order Council)	Mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 18 September 1988, setelah menindak secara brutal Pemberontakan 8888. Mengganti nama negara dari Burma menjadi Myanmar pada 1989. Mengadakan Pemilu 1990 yang dimenangkan telak oleh NLD tetapi menolak mengakui dan menyerahkan kekuasaan. Memerintah di bawah Hukum Militer.	1988-1997
Than Shwe (State Peace and Development Council)	Restrukturisasi dan penggantian nama SLORC. Periode di mana Konstitusi 2008 dirumuskan. Konstitusi ini dirancang untuk menjamin dominasi militer melalui alokasi 25% kursi parlemen dan kontrol penuh kementerian pertahanan dan dalam negeri	1997-2011
Min Aung Hlaing (State Administration Council)	Min Aung Hlaing memimpin kudeta 1 Februari 2021, menggulingkan NLD dan membatalkan hasil Pemilu 2020. Mendirikan SAC dan Aung Hlaing mengangkat dirinya sebagai Ketua serta Perdana Menteri. Mengklaim kudeta didasarkan pada klausa keadaan darurat Konstitusi 2008. Memperpanjang status darurat berulang kali, menunda pemilu. Mengaktifkan Undang-Undang Dinas Militer Rakyat (Wajib Militer) 2010 pada Februari 2024 yang mewajibkan pria 18-35 tahun dan wanita 18-27 tahun untuk	2021-hingga sekarang

Pimpinan	Kebijakan	Tahun Berkuasa
	wajib militer dan menerapkan kembali kontrol ekonomi yang ketat.	

Tahun 2011 Myanmar mulai memasuki proses transisi politik, administrasi dan institusional yang menarik perhatian. Pemerintahan sipil diperkenalkan, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri dan pensiunan jenderal U Thein Sein, periode demokrasi terbatas ini ditandai dengan serangkaian reformasi serta pembebasan ribuan tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi pada tahun 2010, pelonggaran sensor pers, dan penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilu pada tahun 2012 dan 2015 bahkan diberikan label lebih bebas dibandingkan pemilu sebelumnya, yang pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi secara telak dari partai militer sehingga memberikan harapan besar akan kemajuan demokrasi di Myanmar.<sup>67</sup>

Kemudian, hubungan antara NLD dan Tatmadaw juga semakin memburuk secara signifikan setelah partai pimpinan Aung Suu Kyi tersebut mulai mendominasi di pemilihan umum. Penyebab semakin rusaknya hubungan antara NLD dan Tatmadaw tersebut disebabkan ketidaknyamanan militer dengan menguatnya kekuatan dan legitimasi sipil, sehingga militer merasa terancam oleh popularitas San Suu Kyi yang secara tidak langsung menjatuhkan popularitas Tatmadaw sebagai simbol nasionalisasi Burma yang satu-satunya pelindung negara.

---

<sup>67</sup> Rebecca Ratcliffe. (2025). *Myanmar civil war: a quick guide to the conflict*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2025/jan/31/why-is-myanmar-embroiled-in-conflict> (diakses pada 29/08/25)

Ketegangan semakin meningkat secara substansial ketika NLD mendorong perubahan konstitusi pada Maret 2020 yang akan melucuti kekuasaan politik militer. Langkah tersebut merupakan upaya langsung NLD untuk menegaskan supremasi sipil, yang dilihat oleh militer sebagai garis merah yang tidak bisa dilewati, ditambah dengan keberhasilan NLD yang memenangkan 396 dari 476 kursi yang mewakili sekitar 83% parlemen, sehingga menjadikan titik puncak bagi militer, sehingga mereka merasa paranoid akan terkikisnya kekuasaan mereka lebih jauh apabila NLD membentuk pemerintahan sipil baru yang semakin pro demokrasi.<sup>68</sup>

Kemenangan NLD tidak hanya itu sebagai pemicu, akan tetapi skala dari kemenangan itu tetapi, melihat kemajuan demokrasi yang dibawa oleh NLD yang semakin menguat sebagai ancaman langsung pada posisi mengakar mereka dan identitas mereka sebagai pelindung negara. Sehingga menunjukkan transisi yang terkendali oleh militer hanya akan ditoleransi selama tidak mengancam hegemoni militer yang tidak tergoyangkan. Popularitas Aung San Suu Kyi, bahkan setelah kritik internasional, memperburuk ketakutan militer akan legitimasi mereka. Serta konflik sipil-militer di Myanmar bukan hanya perebutan kekuasaan tetapi juga perebutan legitimasi yang mendalam. Militer tidak dapat menerima pemerintahan sipil yang memiliki legitimasi populer yang lebih besar dari militer, serta menentang klaim militer sebagai satu-satunya penyatu Myanmar.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Darin Self. (2021). *Myanmar Lays Bare Challenges of Military-Led Democratization*. Relief Web International. <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-lays-bare-challenges-military-led-democratization> (diakses pada 30/08/25)

<sup>69</sup> *Ibid.*

Pada 1 Februari 2021, pagi sehari sebelum sidang perdana parlemen yang baru menjabat akan digelar, ketika itu militer melakukan kudeta. Langkah pertama mereka dengan menahan Aung Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pimpinan NLD serta anggota parlemen yang lain. Setelah kudeta militer memberlakukan darurat militer selama 1 tahun serta membentuk *State Administration Council* (SAC) yang dipimpin oleh Pemimpin Militer Jenderal Min Aung Hlaing, dan mendeklarasikan bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan setelah periode dirinya, berlanjut hingga pada 1 Agustus 2021 Jenderal Min Aung Hlaing mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri.<sup>70</sup>

Kudeta militer pada Februari tersebut memicu gelombang perlawanan domestik yang belum pernah terjadi pada periode sebelumnya, protes pecah pada 2 Februari dimulai dengan gerakan warga Yangon yang memukulkan panci dan wajan sebagai bentuk protes secara simbolis terhadap aksi kudeta militer, berlanjut dengan mogok kerja tenaga kesehatan dan para akademika universitas.<sup>71</sup>

Gerakan Pembangkangan Sipil (*Civil Disobedience Movement*) meluas dengan cepat, melibatkan ribuan pengemudi bus, pekerja pabrik, guru, dan pegawai negeri yang menolak bekerja di bawah pemerintahan militer Aung Hlaing. Gerakan Pembangkang Sipil sendiri secara cukup memberikan gangguan pada operasi negara dan pendapatan militer pasca kudeta dengan memberikan tingkat perlawanan yang terorganisasi dan meluas, skala protes terus tumbuh di seluruh

---

<sup>70</sup> Lindsay Maizland. (2022). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/background/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya> (diakses pada 01/09/25)

<sup>71</sup> Nicholas Birns. (2023). *Auspicious Day of 8/8/88 Turns Deadly in Rangoon*. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/auspicious-day-8888-turns-deadly-rangoon> (diakses pada 01/09/25)

wilayah Myanmar dengan puluhan ribu warga tergabung untuk turun dalam demonstrasi di jalanan, selain berupa mogok kerja, protes juga meliputi kampanye untuk boikot militer, gerakan memukul panci, kampanye pita merah.<sup>72</sup>

Pihak Militer menganggap mudah perlawanan sipil yang mereka hadapi, pada nyata nya *Civil Disobedience Movement* melumpuhkan sektor-sektor penting negara, menunjukkan bahwa masyarakat Myanmar, terutama generasi muda yang telah merasakan kebebasan parsial sehingga tidak lagi menerima pemerintahan militer. Menunjukkan bahwa respon jauh lebih terorganisir, meluas dan berani dibandingkan protes sebelumnya dan menunjukkan perubahan dalam kesadaran politik dan tekad sipil. Meskipun militer memiliki kekuatan bersenjata tetapi legitimasi mereka di mata rakyat telah runtuh, perlawanan sipil tersebut menciptakan krisis legitimasi yang mendalam bagi junta yang pada akhirnya memicu respon yang lebih brutal, dengan itu militer tidak dapat mengendalikan situasi melalui cara-cara non kekerasan.

Militer merespon perlawanan sipil dengan cepat dan secara brutal dengan mengerahkan pasukan keamanan yakni bersala dari tentara dan polisi untuk menumpas kerumunan massa, mereka mulai menembak massa aksi damai dengan amunisi tajam sehingga mengakibatkan kematian pengunjuk rasa sejak awal Februari hingga akhir Maret 2021, atas itu PBB memperkirakan pasukan keamanan telah menghilangkan nyawa setidaknya sebanyak 138 pengunjuk rasa, angka tersebut termasuk korban berupa anak-anak dan menahan lebih dari sekitar dua ribu orang

---

<sup>72</sup> Elizabeth Mohn. (2024). *2021 Myanmar protests*. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/military-history-and-science/2021-myanmar-protests> (diakses pada 02/09/25)

yang termasuk pejabat, jurnalis dan pengunjung rasa. Angka korban terus bertambah dengan laporan sebanyak 1.500 orang telah tewas dan 8000 orang ditangkap pada Februari 2022 dan terus berlanjut hingga laporan terakhir menyebutkan lebih dari 82.036 total tewas berdasarkan data *Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED)* dan 28.051 telah ditangkap pada tenggang waktu 31 Desember 2024.<sup>73</sup>

Penumpasan atau penanganan militer secara brutal, termasuk dalam penggunaan peluru tajam terhadap masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi secara damai dan taktik bumi hangus yang menargetkan sipil, menunjukkan bahwa militer tidak mampu mengendalikan situasi melalui cara-cara politik atau non represif. Skala kekerasan represif ini merupakan indikasi keputusan yang diambil oleh militer dalam menghadapi perlawanan sipil yang meluas bukan tanda kekuatan absolut, dengan semakin luas dan banyaknya perlawanan maka semakin brutal juga respon militer, sehingga menciptakan lingkaran kekerasan dan penderitaan bagi masyarakat sipil.

Kekerasan yang brutal ini tidak hanya menyebabkan krisis kemanusiaan tetapi juga mendorong perlawanan bersenjata yang mengubah konflik dari protes sipil menjadi perang saudara skala penuh dan memperkuat argumen akuntabilitas internasional serta intervensi kemanusiaan yang sedang terjadi.

Respon terhadap kudeta dan penumpasan brutal, para politisi yang digulingkan membentuk pemerintahan persatuan nasional (*National Unity Government*) pada April 2021, NUG mengklaim sebagai pemerintahan bayangan dan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

mencari pengakuan diplomatik, kemudian membentuk Pasukan Pertahanan Rakyat (*People Defence Force*) sebagai sayap perlawanan bersenjata melawan Junta Militer.<sup>74</sup>

Banyak dari kelompok etnis bersenjata yang telah lama berjuang untuk otonomi dan nasib mereka sendiri, telah bergabung dalam konflik dan bersekutu dengan pasukan perlawanan yang baru dibentuk tersebut, koalisi seperti *Three Brotherhood Alliance* (Arakan Army, MNDA, TNLA) telah melancarkan serangan perlawanan secara signifikan dan memberikan tantangan besar bagi militer.<sup>75</sup>

Perang saudara yang sedang berlangsung telah menyebabkan puluhan ribu kematian dan jutaan warga mengungsi, militer sendiri telah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah dengan perkiraan mereka hanya menguasai sekitar 21% wilayah negara pada tahun 2024, sementara pasukan pemberontak dan tentara etnis telah menguasai sekitar 42% wilayah, dengan beranggotakan pada PDF sendiri sebanyak 85000 tentara pada tahun 2024. Kemudian militer menggunakan taktik brutal termasuk dengan serangan udara tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan pembakaran desa dan militer mengalami kekurangan tenaga dan moral yang menyebabkan adanya pemberlakuan wajib militer pada Februari 2024.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Civil War in Myanmar*. (2025). CFR: Global Conflict Tracker. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/rohingya-crisis-myanmar> (diakses pada 02/09/25)

<sup>75</sup> Lindsay Maizland. (2022). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/background/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya> (diakses pada 02/09/25)

<sup>76</sup> Rebecca Ratcliffe. (2025). *Myanmar civil war: a quick guide to the conflict*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2025/jan/31/why-is-myanmar-embroiled-in-conflict> (diakses pada 03/09/25)

Kudeta 2021, alih-alih mengkonsolidasikan kekuasaan militer, justru memicu perang saudara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan secara paradoks melemahkan kendali teritorial militer. Pembentukan NUG/PDF dan aliansi dengan EAO menunjukkan bahwa perlawanan telah berevolusi dari protes pasif menjadi perjuangan bersenjata yang terorganisir dan terkoordinasi. Kehilangan wilayah yang signifikan oleh Tatmadaw adalah bukti bahwa strategi represif mereka tidak efektif dalam jangka panjang dan justru menciptakan musuh yang lebih kuat dan bersatu menantang klaim militer atas kontrol dan legitimasi. Myanmar berada dalam kondisi fragmentasi negara yang parah, di mana kontrol sipil tidak hanya sulit dicapai tetapi juga gagasan tentang negara kesatuan itu sendiri sedang dipertanyakan.

Tantangan utama terhadap kontrol sipil di Myanmar bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan hegemoni ideologi militer yang mengakar. Militer tidak hanya memegang kekuasaan fisik dan ekonomi tetapi juga narasi historis dan identitas nasional, yang memberikan mereka kepercayaan bahwa hanya militer yang mampu memerintah dan menjaga kedaulatan negara. Sehingga memberikan hambatan psikologis dan institusional yang sangat sulit diatasi oleh aktor sipil.

Anggota militer mendapatkan kekebalan hukum melalui pasal 445 konstitusi 2008, pasal tersebut melindungi militer dari akuntabilitas hukum atas tindakan mereka. Pasal tersebut menjadi kunci yang memungkinkan militer melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa konsekuensi, Militer secara sistematis memanipulasi hukum dan sistem peradilan untuk menindas perbedaan

dengan militer, menahan secara semena-mena, dan menjatuhkan hukuman berat melalui peradilan tertutup yang tidak sesuai standar.<sup>77</sup>

Kudeta 2021 sendiri telah memperdalam perang saudara yang sudah berlangsung lama dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata dan memicu konflik baru dengan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang baru dibentuk. Militer telah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah negara, dengan kelompok-kelompok bersenjata etnis dan pasukan perlawanan menguasai wilayah yang signifikan terutama di daerah perbatasan. Ini menunjukkan kegagalan militer untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.<sup>78</sup>

Meskipun ada klaim tentang "unit federal" baru yang muncul di wilayah yang dikendalikan EAO, ada juga kekhawatiran tentang tantangan tata kelola, seperti pola wajib militer paksa, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas EAO terhadap warga sipil, Ini menunjukkan bahwa di wilayah yang tidak lagi di bawah kendali militer, tantangan terhadap tata kelola yang demokratis dan perlindungan hak asasi manusia tetap ada.<sup>79</sup>

Terjadinya kudeta militer pada 2021, alih-alih mengkonsolidasikan kekuasaan militer tetapi memicu perang saudara yang belum pernah terjadi sebelumnya di Myanmar dan melemahkan kendali teritorial militer. Pembentukan

---

<sup>77</sup> Pwint Htun. (2021). *Beyond the Coup in Myanmar: "In Accordance with the Law" – How the Military Perverts Rule of Law to Oppress Civilians*. Human Rights Clinic Law. <https://humanrightsclinic.law.harvard.edu/beyond-the-coup-in-myanmar-in-accordance-with-the-law-how-the-military-perverts-rule-of-law-to-oppress-civilians/> (diakses pada 03/09/25)

<sup>78</sup> Lindsay Maizland. (2022). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/background/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya> (diakses pada 03/09/25)

<sup>79</sup> David Scott Mathieson. (2025). *The Risks of Romanticizing Rebel Governance in Myanmar*. The Irrawaddy. <https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/the-risks-of-romanticizing-rebel-governance-in-myanmar.html> (diakses pada 03/09/25)

NUG atau PDF dan aliansi dengan EAO menunjukkan bahwa perlawanan telah berevolusi dari protes pasif menjadi perjuangan bersenjata yang terorganisir dan terkoordinasi. Kehilangan wilayah yang signifikan oleh Tatmadaw merupakan bukti bahwa strategi represif mereka tidak efektif dalam jangka panjang melainkan justru menciptakan musuh yang lebih kuat dan bersatu untuk menentang klaim militer atas kontrol dan legitimasi. Myanmar berada dalam kondisi fragmentasi negara yang parah, di mana kontrol sipil tidak hanya sulit dicapai tetapi juga gagasan tentang negara kesatuan itu sendiri sedang dipertanyakan.

### **2.3 Dampak Kudeta Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Kudeta militer 2021 telah memicu guncangan ekonomi yang parah dan meluas di seluruh Myanmar. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut terperosok ke dalam krisis yang mendalam, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan sebesar -10,50% pada tahun 2021 yang merupakan level terendah sejak tahun 1994. Kondisi tersebut menyebabkan ekonomi Myanmar berada sekitar 10% lebih kecil dibandingkan ukurannya sebelum kudeta dan diperkirakan hanya akan tumbuh secara minimal di tahun-tahun mendatang.<sup>80</sup>

Selain guncangan pada PDB, kudeta juga memicu laju inflasi yang tidak terkendali dan depresiasi mata uang Kyat secara drastis. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa inflasi secara keseluruhan naik sekitar 30% hingga September

---

<sup>80</sup> *Bank Dunia Prediksi Ekonomi Myanmar Bisa Merosot 10 Persen karena Kudeta Militer.* (2021). Tempo. <https://www.tempo.co/internasional/bank-dunia-prediksi-ekonomi-myanmar-bisa-merosot-10-persen-karena-kudeta-militer-527514> (diakses pada 04/09/25)

2023. Lonjakan harga ini sangat menekan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang dilanda konflik, pada beberapa wilayah yang paling parah terkena dampak pertempuran, seperti Kayin, Kachin, Sagaing, dan Shan utara, kenaikan harga mencapai 40% hingga 50% yang dimana kondisi jauh lebih mengerikan terjadi di Negara Bagian Rakhine harga melonjak hingga 200% dalam satu tahun, menunjukkan korelasi langsung antara intensitas konflik bersenjata dan penderitaan ekonomi. Sementara itu, nilai mata uang Kyat terus jatuh diperdagangkan di pasar gelap dengan nilai lebih dari 4.500 per dolar AS pada Mei 2024, jauh di atas nilai tukar resmi 2.100.<sup>81</sup>

### **2.3.1 Dampak Kudeta Terhadap Kondisi Sosial**

Kudeta militer memicu reaksi keras dari masyarakat sipil, yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata skala penuh. Jutaan orang turun ke jalan dalam aksi protes massal. Namun, respons brutal militer dengan kekerasan yang terus meningkat memicu pembentukan kelompok sipil bersenjata, yang mengubah protes menjadi pertempuran mematikan. Tindakan represif junta militer, termasuk pengeboman sekolah yang menewaskan anak-anak, telah memperdalam perpecahan dan ketegangan berbasis identitas yang sudah ada, sekaligus menyatukan masyarakat dari berbagai etnis yang sebelumnya terdiskriminasi dalam satu front perlawanan terhadap militer.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Zsombor Peter. (2024). *World Bank: Inflation, poverty keep climbing in war-torn Myanmar*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/world-bank-inflation-poverty-keep-climbing-in-war-torn-myanmar/7653449.html> (diakses pada 04/09/25)

<sup>82</sup> Ramadhan, T. M., Indrasari, A. F. P., & Marsingga, P. (2023). Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021. *Journal of Integrative International Relations*, 8(2). Hlm 3.

Seiring berjalannya konflik, militer Myanmar telah kehilangan sekitar 21.000 tentara karena kematian, desersi, atau pembelotan. Sebagai respons terhadap kerugian besar ini junta mengumumkan wajib militer bagi semua remaja putra dan putri pada April 2024. Kebijakan ini segera memicu kepanikan dan ketakutan yang meluas, mendorong banyak pemuda untuk melarikan diri dari negara tersebut, menunjukkan hilangnya harapan dan keinginan untuk menghindari keterlibatan dalam konflik yang dipaksakan.

Kudeta militer telah memperburuk kondisi sosial-ekonomi yang sudah ada, menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dan krisis kemanusiaan yang mendalam. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2022, hampir setengah dari populasi Myanmar, yaitu sekitar 22 juta orang, telah jatuh ke dalam kemiskinan dalam waktu kurang dari 18 bulan sejak kudeta. Situasi ini diperburuk oleh harga pangan yang terus melambung tinggi, sehingga akses terhadap pangan dasar menjadi semakin sulit bagi masyarakat yang terdampak, memicu krisis kerawanan pangan, terutama di wilayah-wilayah yang paling parah terkena dampak konflik seperti Rakhine, Chin, Kayah, Kayin, Sagaing, dan Mandalay.<sup>83</sup>

Krisis ini juga memicu gelombang pengungsian internal dan perpindahan penduduk secara masif. Hingga akhir 2023, jumlah pengungsi internal (IDP) di Myanmar melonjak menjadi sekitar 2,9 juta orang, naik drastis dari 1,5 juta pada akhir 2022, peningkatan signifikan ini terutama disebabkan oleh eskalasi konflik di berbagai wilayah, selain konflik, bencana alam seperti Siklon Mocha pada Mei

---

<sup>83</sup> Zsombor Peter. (2024). *World Bank: Inflation, poverty keep climbing in war-torn Myanmar*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/world-bank-inflation-poverty-keep-climbing-in-war-torn-myanmar/7653449.html> (diakses pada 05/09/25)

2023 juga menyebabkan 912.000 perpindahan yang memperparah krisis kemanusiaan yang sudah ada.<sup>84</sup>

Sebagai respons langsung terhadap kudeta, ribuan pegawai negeri sipil di seluruh Myanmar, termasuk dokter, perawat, guru, dan staf kementerian lainnya, bergabung dalam Gerakan Pembangkangan Sipil (*Civil Disobedience Movement / CDM*). Gerakan ini, yang dipimpin oleh para tenaga medis secara masif menolak untuk bekerja di bawah pemerintahan militer. Aksi ini bukanlah sekadar demonstrasi melainkan sebuah bentuk perlawanan non-militer yang strategis yang bertujuan untuk meruntuhkan legitimasi dan fungsi negara dari dalam.<sup>85</sup>

Dampak dari gerakan ini sangat signifikan, sistem kesehatan Myanmar nyaris kolaps di tengah pandemi COVID-19 dengan banyak rumah sakit umum tutup karena dokter dan perawat mogok. Pasien kanker terpaksa menghentikan terapi mereka dan klinik-klinik bawah tanah bermunculan untuk mengisi kekosongan. Lebih dari itu, sistem pendidikan juga lumpuh seperti penutupan sekolah selama hampir dua tahun akibat kombinasi pandemi dan kudeta menyebabkan kerugian pembelajaran yang masif. Laporan Bank Dunia memperkirakan bahwa rata-rata tahun sekolah yang disesuaikan dengan pembelajaran (*LAYS*) untuk angkatan anak usia sekolah saat ini akan menurun hingga 2,2 tahun sebuah indikasi bahwa anak-anak di Myanmar tidak belajar apa pun selama periode tersebut. Kerugian ini diperkirakan akan mengurangi

---

<sup>84</sup> *Myanmar Crisis Response Plan 2023*. (2023). Crisis Response. <https://crisisresponse.iom.int/response/myanmar-crisis-response-plan-2023> (diakses pada 05/09/25)

<sup>85</sup> *Kudeta Myanmar Bikin Layanan Kesehatan Nyaris Kolaps Saat Pandemi*. (2021). Detik News. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5547709/kudeta-myanmar-bikin-layanan-kesehatan-nyaris-kolaps-saat-pandemi> (diakses pada 06/09/25)

pendapatan masa depan mereka secara substansial menciptakan "generasi yang hilang".<sup>86</sup>

Tindakan strategis para peserta CDM ini menciptakan dilema mendalam bagi junta militer. Dengan melumpuhkan fungsi-fungsi inti negara, mereka menunjukkan bahwa pemerintahan militer tidak memiliki legitimasi dan tidak dapat mengelola negara tanpa partisipasi rakyat. Hal tersebut mengubah krisis sosial menjadi medan pertempuran yang sama pentingnya dengan konflik bersenjata dimana masyarakat sipil menggunakan penolakan total sebagai senjata.

Dampak ekonomi dan sosial dari kudeta tidak berjalan secara independen, melainkan saling memperkuat dalam sebuah "lingkaran setan" yang destruktif. Kudeta adalah pemicu awal, namun interaksi antara krisis yang ditimbulkannya telah menciptakan fenomena kohesif yang jauh lebih kompleks. Pertama, kemerosotan ekonomi yang parah yang ditandai dengan penurunan PDB, PHK massal, dan inflasi yang meroket mendorong jutaan orang ke dalam kemiskinan ekstrem dan keputusasaan. Keputusan ini menjadi pemantik tambahan bagi perlawanan bersenjata dan pergeseran menuju ekonomi ilegal, seperti produksi narkoba. Sehingga krisis ekonomi secara langsung memperkuat krisis sosial dalam bentuk konflik bersenjata dan peningkatan kejahatan.<sup>87</sup>

Kudeta militer 2021 di Myanmar bukanlah sekadar pergantian kekuasaan, melainkan pemicu kehancuran sistemik yang menciptakan "lingkaran setan" antara

---

<sup>86</sup> Learning in Myanmar Pre and Post-Covid-19 . (2022). *World Bank Group*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099717107062225955/pdf/IDU0711e9002035af040c9080cc0245b41298764.pdf> (diakses pada 06/09/25)

<sup>87</sup> Ramadhan, T. M., Indrasari, A. F. P., & Marsingga, P. (2023). Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021. *Journal of Integrative International Relations*, 8(2). Hlm 3.

krisis ekonomi dan sosial. Analisis menunjukkan bahwa dampak ekonomi dan sosial saling memperkuat satu sama lain dalam siklus negatif. Keruntuhan PDB dan lonjakan inflasi telah mendorong jutaan orang ke dalam kemiskinan dan memicu transisi ke ekonomi ilegal. Pada saat yang sama, konflik yang dihasilkan dari krisis sosial telah menghancurkan infrastruktur, mengganggu layanan publik, dan menciptakan gelombang pengungsi internal yang masif, yang pada gilirannya memperparah kemerosotan ekonomi. Di tengah kekacauan ini, Gerakan Pembangkangan Sipil muncul sebagai bentuk perlawanan yang strategis dan efektif, melumpuhkan fungsi-fungsi negara dan menunjukkan penolakan total masyarakat terhadap legitimasi junta.

### **2.3.2 Dampak Pada Sektor Ekonomi**

Kudeta telah secara signifikan menghambat minat investasi asing, yang sebelumnya bernilai miliaran dolar. Perusahaan-perusahaan besar dari Amerika Serikat dan Barat, seperti Samsonite, LL Bean, H&M, dan Adidas, diperkirakan akan mengurangi investasi atau bahkan menarik diri sepenuhnya akibat meningkatnya risiko politik, sanksi internasional, dan catatan hak asasi manusia yang bermasalah. Laporan dari Bank Dunia secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kontraksi ekonomi adalah gangguan yang sedang berlangsung pada layanan publik esensial seperti perbankan, logistik, dan layanan internet. Krisis ini diperparah oleh keputusan *Financial Action Taskforce* (FATF) yang memasukkan Myanmar ke dalam daftar hitam pada Oktober

2022, yang semakin mengganggu layanan perbankan dan aliran dana ke dalam negara.<sup>88</sup>

Meskipun demikian, dampak sanksi Barat cenderung terbatas karena sebagian besar investasi di Myanmar berasal dari negara-negara Asia, dengan Singapura dan Hong Kong menjadi investor terbesar, masing-masing menyumbang 34% dan 26% dari total investasi asing langsung (FDI) pada tahun fiskal 2020. Analisis perdagangan mencatat bahwa meskipun sanksi psikologis berdampak, Myanmar tidak pernah terlalu bergantung pada investasi Barat untuk aliran dolar, Kondisi ini menciptakan situasi di mana investor Barat cenderung menjauh, sementara Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang bisa diandalkan untuk investasi.<sup>89</sup>

Dampak kudeta juga terasa secara langsung pada sektor riil, terutama pada industri padat karya dan pertanian. Kemudian industri garmen yang merupakan salah satu sektor ekspor utama, mengalami kerugian besar akibat kudeta, dengan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan, kondisi kerja yang memburuk dan praktik kerja paksa dilaporkan meningkat, seiring dengan kekacauan politik dan ekonomi.<sup>90</sup>

Sektor pertanian, yang menjadi basis utama ekonomi Myanmar, juga tidak luput dari kehancuran. Sektor ini telah mengalami penurunan dan sekarang hanya

---

<sup>88</sup> *Myanmar Crisis Response Plan 2023*. (2023). Crisis Response. <https://crisisresponse.iom.int/response/myanmar-crisis-response-plan-2023> (diakses pada 04/09/25)

<sup>89</sup> *Kudeta Militer "Mungkin Hancurkan" Perekonomian Myanmar*. (2021). Detik News. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5359086/kudeta-militer-mungkin-hancurkan-perekonomian-myanmar> (diakses pada 05/09/25)

<sup>90</sup> *Perekonomian Myanmar Pasca Pandemi Covid-19 dan Kudeta Militer 2021*. (2022). Binus University. <https://student-activity.binus.ac.id/himhi/2022/05/perekonomian-myanmar-pasca-pandemi-covid-19-dan-kudeta-militer-2021/> (diakses pada 05/09/25)

menyumbang 36% dari PDB. Kondisi konflik bersenjata dan bencana alam, seperti Siklon Mocha pada tahun 2023, secara signifikan merusak infrastruktur pertanian dan sumber daya penting seperti lahan dan sistem irigasi, yang membatasi kemampuan negara untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan. Ini secara langsung memperburuk krisis kerawanan pangan dan kemiskinan di daerah yang terkena dampak.<sup>91</sup>

Kemerosotan ekonomi pasca-kudeta telah menciptakan kondisi di mana masyarakat, terutama petani, terpaksa mencari sumber pendapatan alternatif yang sering kali ilegal. Analisis menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang diakibatkan oleh perang saudara mendorong peningkatan produksi dan ekspor obat-obatan terlarang secara signifikan. Ambruknya sistem kredit pedesaan membuat para petani putus asa dan beralih ke budidaya opium dan produksi metamfetamin. Pada tahun 2023, lebih dari 150 ton heroin diekspor dari Myanmar dengan nilai lebih dari 2 miliar dolar AS di pasar gelap. Peningkatan produksi narkoba ini tidak hanya menjadi respons terhadap keputusan ekonomi tetapi juga merupakan hasil dari strategi pemerintahan junta yang disengaja.<sup>92</sup>

Kemudian terjadinya gangguan layanan perbankan, logistik, dan layanan internet yang disengaja oleh junta militer sebagai bagian dari taktik kontrol telah meruntuhkan ekonomi formal. Keruntuhan ekonomi secara sistematis ini secara tidak langsung menciptakan ruang bagi ekonomi ilegal yang lebih sulit dikontrol

---

<sup>91</sup> Myanmar - Pertumbuhan PDB (y-on-y). (n.d.). Trading Economics. <https://id.tradingeconomics.com/myanmar/gdp-growth-annual> (diakses pada 05/09/25)

<sup>92</sup> Deutsche Welle. (2024). *Krisis Ekonomi Akibat Perang, Myanmar Genjot Produksi Ilegal Narkoba*. Detik News. <https://news.detik.com/dw/d-7384992/krisis-ekonomi-akibat-perang-myanmar-genjot-produksi-ilegal-narkoba> (diakses pada 05/09/25)

oleh sanksi internasional, sekaligus menjadi sumber pendanaan alternatif bagi sindikat kejahatan dan kemungkinan faksi-faksi yang bersekutu dengan junta, atas dasar berbagai perilaku atau kebijakan ekonomi yang sangat mengontorl dengan itu junta tidak hanya mengabaikan kesehatan ekonomi formal, tetapi juga mengalihkan fokus ke ekonomi bayangan yang memungkinkan mereka bertahan di tengah tekanan global, sehingga lebih mementingkan membiayai operasi militer dengan mengorbankan kesejahteraan rakyatnya.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Bank Dunia *Prediksi Ekonomi Myanmar Bisa Merosot 10 Persen karena Kudeta Militer*. (2021). Tempo. <https://www.tempo.co/internasional/bank-dunia-prediksi-ekonomi-myanmar-bisa-merosot-10-persen-karena-kudeta-militer-527514> (diakses pada 05/09/25)